PEMKAB BANGKA TENGAH EVALUASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN OMBUDSMAN

Kamis, 19 November 2026 - kepbabel

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah praktik maladministrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda di Koba, Rabu, mengatakan kerja sama yang berlangsung sejak 21 Juni 2023 hingga 21 Juni 2028 tersebut telah memberikan manfaat melalui pendampingan, konsultasi dan masukan Ombudsman dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Kerja sama dengan Ombudsman RI telah membantu kami memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menangani laporan masyarakat dan mencegah terjadinya maladministrasi," katanya saat mengikuti rapat pemantauan dan evaluasi kerja sama secara daring di Koba.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pencegahan maladministrasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

"Melalui konsultasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah memperoleh arahan mengenai ketentuan dan kewenangan pejabat dalam memberikan teguran administratif," ujarnya.

Efrianda mengatakan perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan Ombudsman meliputi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, SD Negeri 1 Koba, RSUD Abu Hanifah, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Ia juga menyoroti pengaduan di sektor pendidikan, terutama terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD dan SMP yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka Tengah Husef Sribuono mengatakan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek penilaian Ombudsman agar memenuhi standar pelayanan publik.

"Penanganan pengaduan masyarakat juga dilakukan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dengan Diskominfosta sebagai koordinator yang menghubungkan laporan dengan organisasi perangkat daerah terkait," jelasnya.

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman RI Esti Budiyarti meminta pemerintah daerah memastikan seluruh kesepakatan kerja sama diwujudkan melalui kegiatan konkret dan terukur, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Ia menekankan pentingnya kejelasan pelaksanaan pendampingan, sosialisasi, dan forum koordinasi,

"Termasuk juga waktu, tempat dan frekuensi kegiatan agar manfaat kerja sama dapat dirasakan langsung dalam peningkatan pelayanan publik," ujanrya.

Pewarta: Ahmadi

Editor : Rustam Effendi